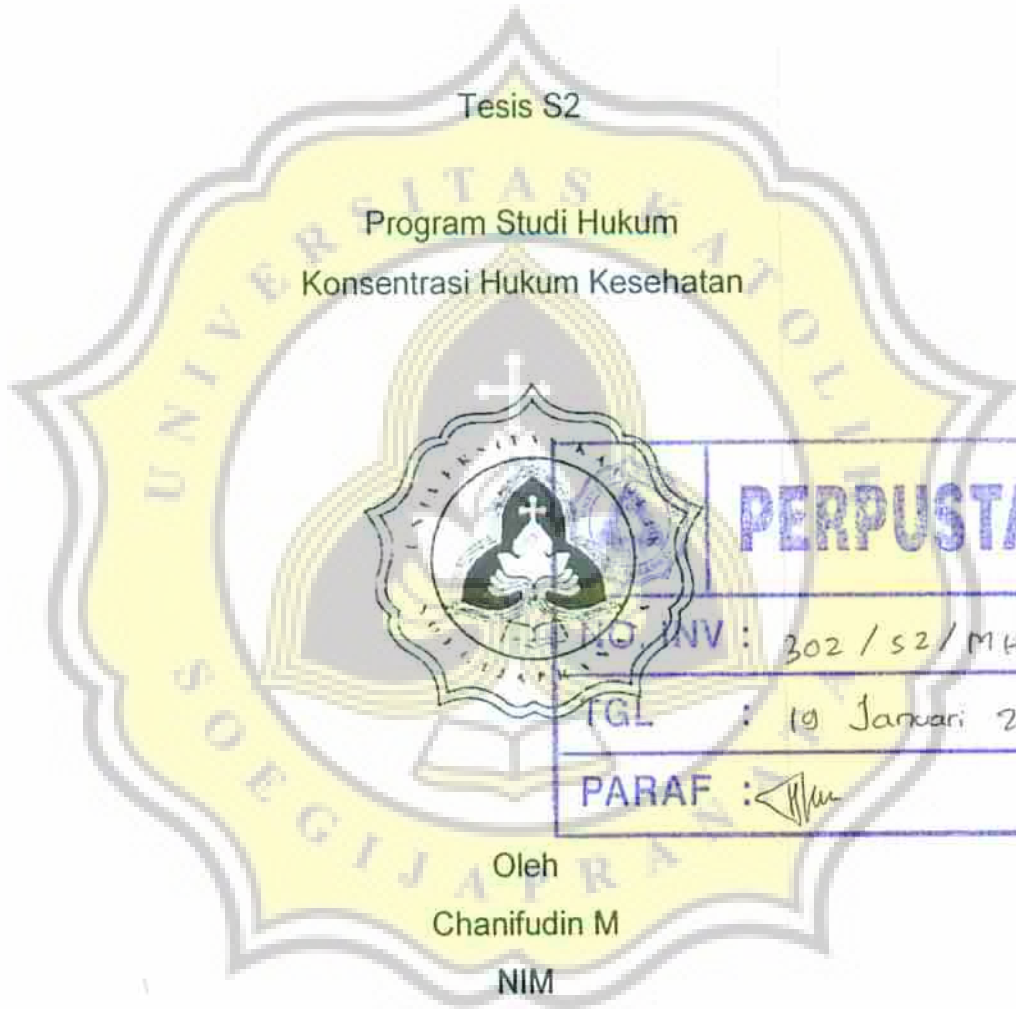


Penelitian

**KEWENANGAN PRAKTEK MANDIRI TENAGA KEPERAWATAN DIDALAM
MELAYANI KESEHATAN MASYARAKAT DITINJAU DARI
HUKUM KESEHATAN
DI DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**

Tesis S2


Program Studi Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



PERPUSTAKAAN

NO NV : 302 / S2 / MHK / C.1

TGL : 10 Januari 2015

PARAF : 

Oleh
Chanifudin M

NIM

05.93.0036

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIKA SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

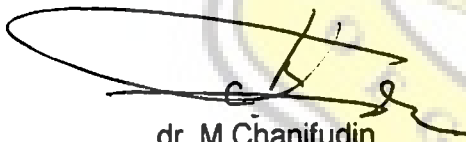
Maret 2007

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah digunakan orang lain untuk memperoleh gelar kemagisteran di suatu perguruan tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain; kecuali yang secara sengaja tertulis dan diacu dalam naskah tesis ini serta disebut dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk kepentingan pernyataan keaslian (originalitas) tesis yang saya buat.

Hormat, saya



dr. M Chanifudin



Penelitian

**KEWENANGAN PRAKTEK MANDIRI TENAGA KEPERAWATAN DIDALAM
MELAYANI KESEHATAN MASYARAKAT DITINJAU DARI
HUKUM KESEHATAN
DI DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**

Tesis S2

Program Studi Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



Oleh
Chanifudin M
NIM
05.93.0036

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIKA SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

Maret 2007

Penelitian

**KEWENANGAN PRAKTEK MANDIRI TENAGA KEPERAWATAN DIDALAM
MELAYANI KESEHATAN MASYARAKAT DITINJAU DARI HUKUM
KESEHATAN
DI DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**

oleh

Chanifudin M

NIM 05.93.0036

Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama



Prof Dr Widanti SH CN

Tanggal



PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : Dr. M. CHANIFUDIN

Nim : 05.93.0036

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 9 Maret 2007

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. Prof.Dr. A. Widanti S, SH.,CN
2. PJ. Soepratignja, SH.,SpN
3. dr. Sofan Dahlan, SpF

(.....)

(.....)

(.....)

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada tanggal : 9 Maret 2007

(Prof. Dr. A. Widanti S, SH. CN)

**Ketua Program Pascasarjana
Magister Hukum**



THE AUTHORITY OF INDEPENDENT NURSING PRACTICE IN SERVING ON HEALTH COMMUNITY FROM THE PERSPECTIVE OF HEALTH LAW

By
Chanifudin M.

ABSTRACT

Discussing about health law is interesting and so with special nursing law related to the regulation of independent nursing practice which especially can be seen from the rising of crucial problems to be solve immediately according to the independent nursing practice it self. We can say that there are such regulation in independent nursing practice law, but there are also so many serious violation done in the field. From the fact above the purpose of this research are knowing the concept of independent nursing practice related to health law practiced especially in Kebumen regency, knowing the obstruction of independent nursing practice related to the implementation of health law especially in Kebumen regency and knowing the forms of authority violation done by nursing practitioner who practice independent nursing practice.

This research done based on descriptive and qualitative survey. The material population is the study of Health law and the sample of the sample of niursing law. The object of of population of the survey are all nursing practitioner who practice independent nursing practice. The data collected from this research are secondary data, documentation and direct observation.

By qualitative objective analitical this research conclude that Health law especially the regulation on independent nursing practice hasn't been fully implemented by nursing practitioner in Kebumen Regency; the obstructions are the courageous of nurses to break againts the law, the understanding of law just as formality, the lack of medical practitioner in Kebumen and their low commitment, the weak of the institution or law in watching to the Health law, the community awareness on that law is still low and no attention giving by legislative. The forms of violation done by nurses can be categorized as trully violation againts the law, the violation done because they have no choice or work underpressure and unrealized violation. The efforts for implementing this law are : improving and creating the regulation of independent nursing practice and encouraging the colaboration betwen nursing practitioner and medical doctor and at least there is no medical doctor involved on independent nursing practice.

Key words : The authority of independent practice – nursing practitioner – the service of health community.



KEWENANGAN PRAKTEK MANDIRI TENAGA KEPERAWATAN DIDALAM MELAYANI KESEHATAN MASYARAKAT DITINJAU DARI HUKUM KESEHATAN DI DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Oleh
Chanifudin M.

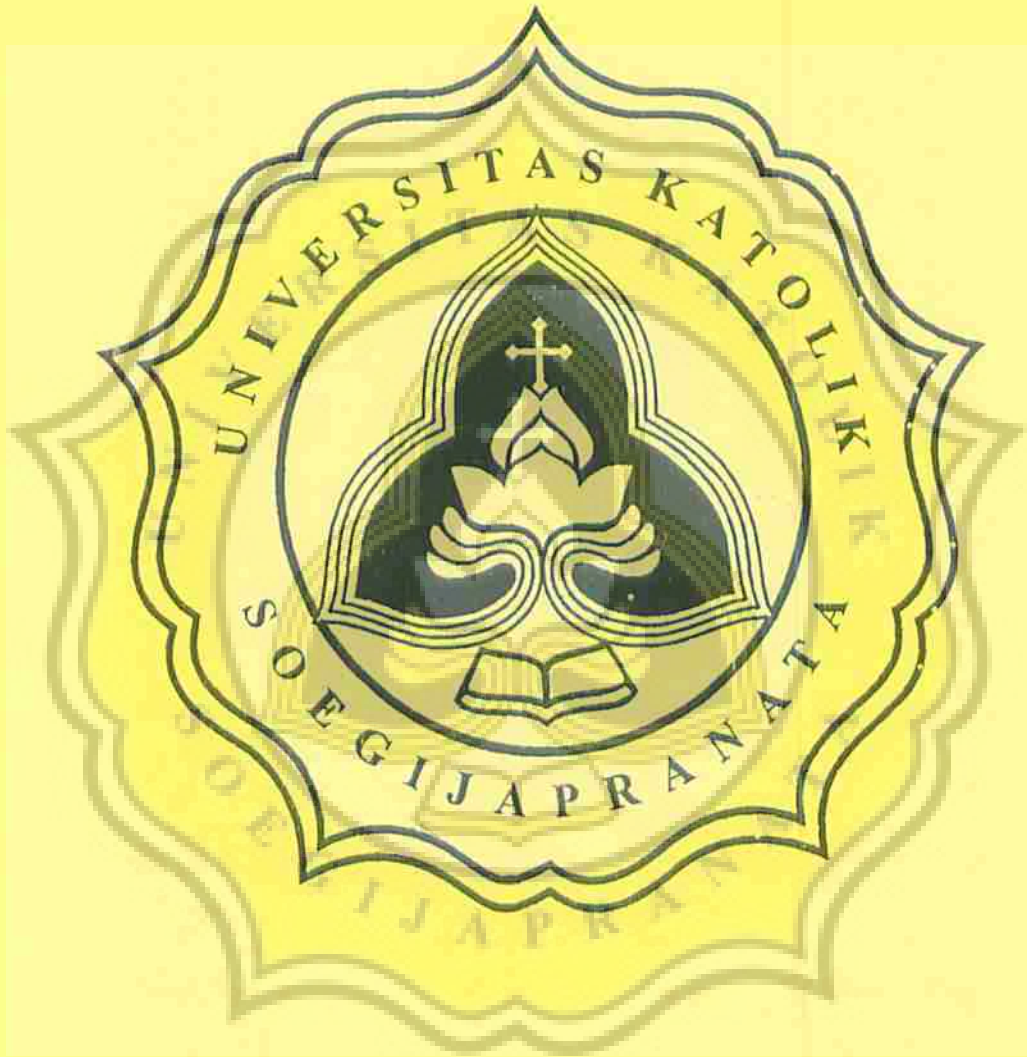
Abstrak

Membahas tentang hukum kesehatan adalah sangat menarik, demikian halnya dengan hukum keperawatan khusus yang menyangkut peraturan keperawatan mandiri. Di daerah – daerah pada umumnya dan di daerah kabupaten Kebumen, pada khususnya nampak sekali adanya berbagai permasalahan yang krusial yang harus segera dipecahkan sehubungan dengan praktik keperawatan mandiri ini. Boleh dikatakan bahwa ada peraturan yang terkandung di dalam hukum keperawatan tentang praktik mandiri, tetapi dalam pelaksanaannya banyak sekali pelanggaran serius yang dilakukan. Dari itu semua tujuan penelitian ini adalah : Mengetahui uraian konsep dari praktik keperawatan mandiri ditinjau dari hukum kesehatan di dalam pelaksanaannya khususnya di daerah Kabupaten Kebumen, mengetahui tentang hambatan – hambatan praktik keperawatan mandiri ditinjau dari hukum kesehatan di dalam pelaksanaannya khususnya di daerah Kabupaten Kebumen dan mengetahui tentang bentuk pelanggaran kewenangan yang dilakukan oleh para tenaga keperawatan yang melakukan praktik keperawatan mandiri tersebut.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian survey yang bersifat deskriptif kualitatif. Populasi materi penelitian adalah ilmu hukum kesehatan dengan sampel hukum keperawatan. Populasi obyek penelitian adalah semua tenaga perawat yang ada di daerah Kabupaten Kebumen dengan sampel tenaga keperawatan yang melakukan praktik mandiri. Data yang didapat dari penelitian ini adalah data sekunder, data dokumentasi, dan pengamatan langsung.

Dengan analisis obyektif kualitatif, penelitian menyimpulkan : Bahwasanya hukum kesehatan khususnya peraturan tentang keperawatan mandiri belum dijalankan dengan sepenuhnya oleh perawat yang melakukan praktik mandiri di daerah Kabupaten Kebumen ; Hambatan – hambatan antara lain adalah : "Keberanian" dari perawat untuk melanggar aturan hukum, hukum dipahami sebagai formalitas hukum semata, kurangnya tenaga dokter dan etos kerja dokter, fungsi pengawasan dari lembaga maupun dari penegak hukum tidak berjalan atau lemah, kesadaran hukum dari masyarakat masih rendah, dan belum ada perhatian dari wakil rakyat ; Berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh perawat dapat dikategorikan pelanggaran yang benar – benar melawan hukum dengan kesadaran, pelanggaran karena terpaksa, dan pelanggaran tanpa disadari. Usaha untuk keterlaksanaannya hukum ini antara lain perbaikan dan pengadaan aturan main tentang perawat mandiri, dan digalakan kolaborasi antar perawat yang melakukan praktik mandiri dan diharuskan menarik anggauta dokter minimal seorang tenaga dokter umum.

Kata Kunci : Kewenangan praktek mandiri - Tenaga keperawatan - Pelayanan kesehatan masyarakat



Kata Pengantar

Penelitian yang terangkum dalam tesis ini dengan maksud secara umum adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hukum kesehatan khususnya di dalam hukum tentang keperawatan mandiri di daerah kabupaten Kebumen. Penelitian ini menjadi sangat menarik karena langsung melihat kebermaknaan pelaksanaan hukum kesehatan tersebut walaupun nampaknya tenang – tenang saja. Air tenang menghanyutkan demikian kata pepatah, dan dalam kenyataan memang nampak hukum tersebut belum dijalankan secara signifikan. Tesis berkaitan dengan pelaksanaan hukum kesehatan, hambatan – hambatan tentang pelaksanaan hukum kesehatan, dan bentuk hambatan yang ada di dalam pelaksanaan hukum kesehatan khususnya di dalam hukum tentang keperawatan mandiri. Selain itu secara khusus dilakukannya penelitian ini dalam rangka mencapai gelar magister hukum dalam keilmuan hukum kesehatan. Penulisan tesis ini kiranya masing banyak sekali kekurangannya, dengan demikian saran dan kritik untuk perbaikan sepenuhnya sangat diperlukan.

Dalam kesempatan ini peneliti menghaturkan rasa terima kasih setinggi – tingginya dan ucapan terima kasih sebanyak – banyaknya dihaturkan kepada :

1. Direktur Pasca Sarjana UNIKA Soegijapranata Semarang
2. Prof Dr Widanti SH CN. selaku pembimbing utama tesis
3. Direktur RSUD Kebumen
4. Direktur RS PKU Muhammadiyah Sruweng
5. Puskesmas : Pejagoan, Sempor, Bulus Pesantren, Sruweng, dan Rowo Kele
6. Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen
7. Semua pihak yang tidak disebutkan namanya

Yang telah membantu sehingga terselesaikannya tesis ini.

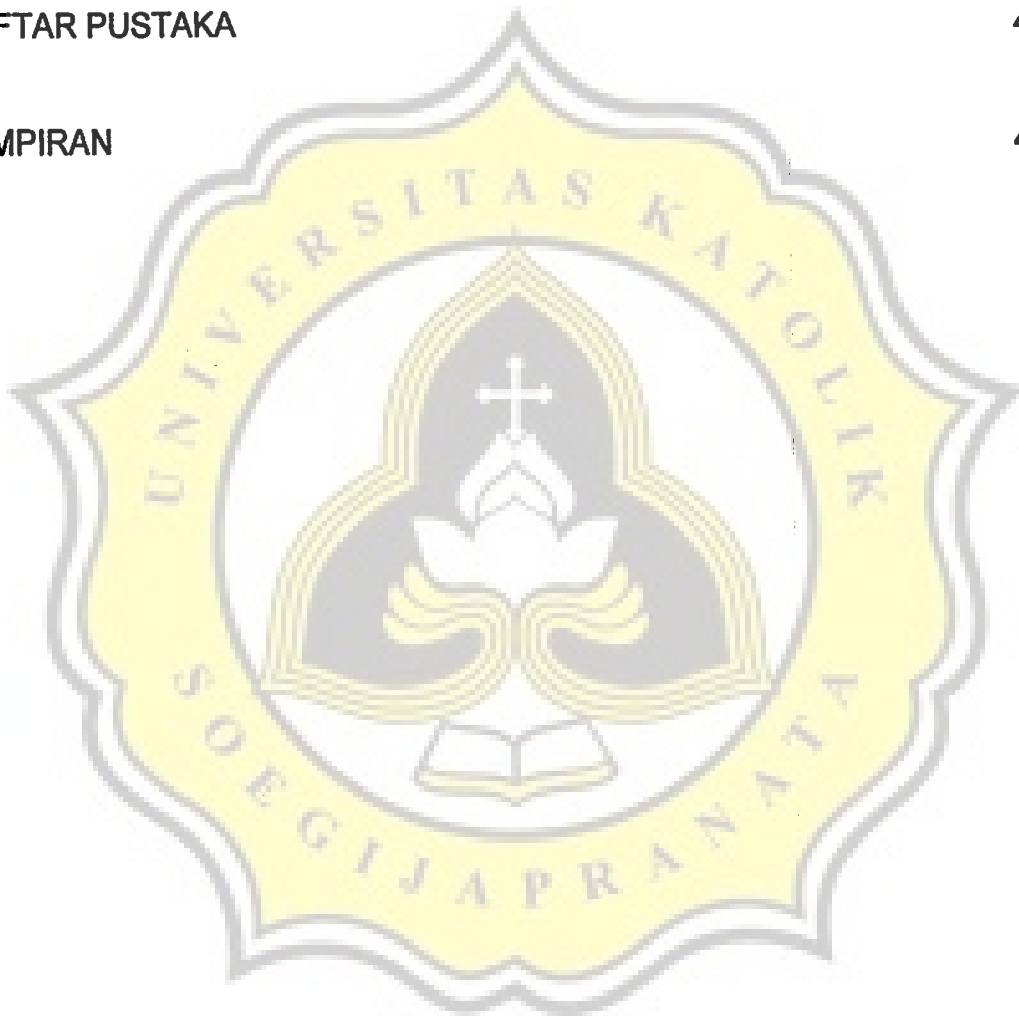
Mudah – mudahan tesis ini dapat bermanfaat di dalam pelaksanaan dan pengembangan ilmu hukum kesehatan khususnya hukum keperawatan.

Semarang, Maret 2007

Peneliti,

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Masalah	7
C. Tujuan	7
D. Manfaat	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KONSEP TEORI	
A. Kewenangan Perawat sebagai Tenaga Keperawatan Mandiri	9
B. Pelayanan Kesehatan Masyarakat	11
C. Masyarakat yang Berobat	13
D. Hukum Kesehatan sebagai Payung Dokter, dan Keperawatan Mandiri	13
E. Keperawatan Mandiri ditinjau dari Segi Hukum	17
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	21
B. Spesifikasi Penelitian	21
C. Jenis Data	21
D. Disain Penelitian	22
E. Definisi Operasional	22
F. Metode Pengumpulan Data	23
G. Metode Analisis Data	24

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	25
B. Pembahasan	31
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	41
B. Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN	47



LAMPIRAN	47
Instrumen Penelitian	48
Data Hasil Penelitian	55
Surat Pernyataan Melakukan Penelitian	61



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Undang – Undang Hukum Kesehatan Hasil Kajian	19
Tabel 2. Hasil angket kewenangan keperawatan mandiri	25
Tabel 3. Hasil angket Hambatan Perawat Praktik Mandiri	27
Tabel 4. Hasil angket tentang Pelanggaran Keperawatan Mandiri	30
Tabel 5. Hasil angket dan wawancara kewenangan keperawatan mandiri	32
Tabel 6. Hasil angket dan Wawancara Hambatan Perawat Praktik Mandiri	35
Tabel 7. Hasil angket dan wawancara ditinjau dari jenis pelanggaran :	39
Tabel 8. Hasil angket keperawatan mandiri	55
Tabel 9. Hasil angket Pendapat Masyarakat , diisi oleh 20 responden	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Paradigma Keperawatan dengan Lingkungan dan Kesehatan	18
Gambar 2. Rentang Sehat dan Sakit	18
Gambar 3. Bagan Disain Penelitian	22
Gambar 4. Ruang Praktik Keperawatan Mandiri	31



